

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih, maka perlu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan didukung adanya sarana prasarana pengelolaan air bersih di Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi sarana prasarana pengelolaan kapasitas jaringan yang dibutuhkan, perlu adanya penambahan jaringan setiap tahun yang di biayai melalui penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong;

/ Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

/ 7. Undang-.....

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

/ 12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 14);

/ Dengan. ....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

dan  
**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
TABALONG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.

/ 5. Penambahan.....

5. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
7. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
8. Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.

**BAB II**

**T U J U A N**

**Pasal 2**

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan pelayanan kepada masyarakat.

/ BAB III.....

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp. 5.411.189.000.- (lima milyar empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rician sebagai berikut :
  - a. Pada tahun 2010 ditetapkan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Pada tahun 2011 ditetapkan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997 tentang Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp.4.099.715.674 (empat milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah).

/ BAB IV. ....

BAB IV  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL DAERAH

Pasal 5

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PDAM.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang diperoleh selama tahun anggaran PDAM menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

/ Agar. ....

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

**BUPATI TABALONG**

Cap.        ttd.

**H. RACHMAN RAMSYI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

**H. ABDEL FADILLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN **2010** NOMOR **04**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 04 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**  
**KABUPATEN TABALONG**

**I. UMUM**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 huruf a angka 3) bahwa Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan Pasal 173 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta, serta Pasal 173 ayat (2), bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Milik Daerah. Maka dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui pengembangan pengelolaan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 75, bahwa pengelolaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

/ 3. Penyertaan.....

- 2 -

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah supaya lebih efektif dan efisien maka ditetapkan jumlahnya sekaligus untuk beberapa tahun, sehingga tidak setiap tahun menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud menjadi hak daerah adalah pembagian keuntungan laba bersih yang diperoleh PDAM sebagai imbalan dari penyertaan modal daerah, tetapi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009, PDAM tidak lagi melakukan kewajiban setoran laba bersih apabila pelayanan PDAM belum mencakup 80% dari jumlah penduduk, sementara ini pelayanan PDAM baru mencakup 40%.

Ayat (2)

Cukup jelas.

/ Pasal 7. ....

Pasal 7  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR **02**